JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 1-11

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

PEMBANGUNAN DAERAH DI TENGAH KETERGANTUNGAN FISKAL: EVALUASI 5 RASIO KEUANGAN LEMBATA

Julia Roses Kadja Dahi[1*], Daud Duli[2], Aloysius L.L. Kobun[3], Daniel Tonu[4]
Universitas Aryasatya Deo Muri[123]

Corresponding email:juliakadja@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lembata dalam mendukung Pembangunan Daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lembata dalam mrendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Lembata dalam mendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Lembata dalam mendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa persentase rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 5,70% dengan kriteria penilaian sangat kurang, Rasio Ketergantungan menunjukan persentase rata-rata sebesar 91,45% dengan kriteria penilaian sangat tinggi, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukan persentase rata-rata sebesar 5,27% dengan kriteria penilaian sangat kurang, Rasio Efektivitas menunjukan persentase rata-rata sebesar 76,85% dengan kriteria penilaian kurang efektif, Rasio Efisiensi menunjukan persentase rata-rata sebesar 99,7% dengan kriteria penilaian tidak efisien. Berdasarkan hasil Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah, menunjukan bahwa Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Lembata.

Kata Kunci
Kemampuan Keuangan Daerah; Pembangunan Daerah; Kabupaten Lembata

Abstract

The aim of this research is to determine the financial independence level of Lembata Regency in supporting regional development. To assess the level of financial dependency of Lembata Regency in supporting regional development. To analyze the level of financial decentralization of Lembata Regency in supporting regional development. To evaluate the effectiveness of the regional finances of Lembata Regency in supporting regional development. To measure the financial efficiency level in Lembata Regency in supporting regional development. This study uses a descriptive quantitative approach. The results show that the average percentage of the Independence Ratio is 5.70%, which falls under the very poor category. The Dependency Ratio shows an average percentage of 91.45%, categorized as very high. The Fiscal Decentralization Degree Ratio shows an average percentage of 5.27%, also categorized as very poor. The Effectiveness Ratio shows an average percentage of 76.85%, categorized as less effective. The Efficiency Ratio shows an average percentage of 99.7%, categorized as inefficient. Based on the results of the Regional Financial Capability Ratio calculation, it indicates that the financial capability of the Lembata Regency Government has not been optimal in implementing regional development in Lembata Regency.

Keywords
Regional Financial Capability; Regional development; Lembata Regency.

Pendahuluan

Otonomi Daerah membawa dampak pada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri (Agusta, 2020). Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara, di susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, yang terdiri dari atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, pembiayaan anggaran dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui dan

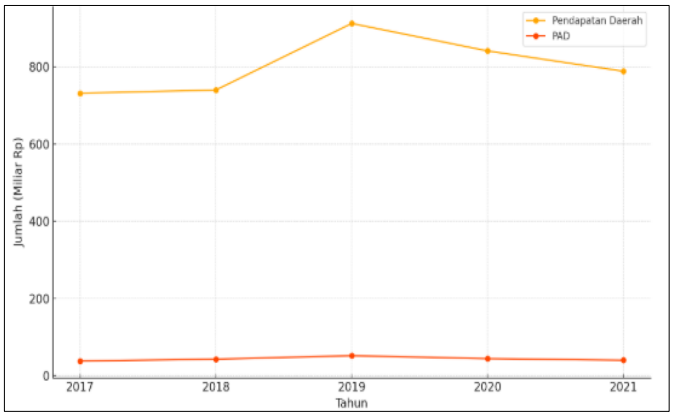
E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk dari penggalian daerah potensi sumber daya daerah (Rizqy Ramadhan, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, denda dan pungutan serta penghasilan perusahaan daerah (Yasin, 2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah meliputi: Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (Martira & Nursadi, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seorang kepala daerah harus memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Khas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang di lampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa kemampuan keuangan daerah belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Gunawan, 2022), (Pratiwi Subianto & Irawan, 2022), (Bosso et al., 2021), (Kamaroellah, 2017). Sebuah hasil penelitian di Kabupaten Tidore menunjukan bahwa Rasio Kemandirian Kota Tidore mampu meningkatkan kemampuan keuangannya (Alting et al., 2018). Sementara itu di Serbia factor penghambat kemampuan keuangan dalam mendukung pembangunan daerah dikarenakan tidak adanya distribusi strategis dalam prosepek pembangunan (Vukovic et al., 2017).

Kabupaten Lembata merupakan sebuah pulau kecil dalam gugusan pulau-pulau di perairan sekitar kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT. Kabupaten Lembata sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara efektif. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021, maka dapat diketahui realisasi pendapatan serta pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Gambar 1.
Realisasi Pendapatan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata (2022)

Berdasarkan ganbar di atas Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,51% Per tahun. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 731.606.447.232,62 meningkat menjadi Rp. 912.327.928.832,20 tahun 2019. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 menurun menjadi Rp. 841.195.830.477,96 dan mengalami penurunan lagi di tahun tahun 2021 sebesar Rp. 788.550.434.946,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2017-2019 yaitu dari Rp. 37.992.916.558,69 tahun 2017 Rp. 42.882.808.397,73 tahun 2018 dan Rp. 51.718.451.391,20 tahun 2019. Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 44.244.016.15 tahun 2021 dan Rp. 52.645.395.532 tahun 2021. Rata-rat pertumbuhan per tahun sebesar 1,06%. Akan tetapi, pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata Tahun 2020 hanya mencapai 4,5% dari target Rp100 miliar. Sedangkan angka kemiskinan saat ini 26% dan ditargetkan pada tahun 2021 akan turun menjadi 22,31-22,68% (Wawo, 2020). Kondisi ini menunjukan bahwa ketika keuangan daerah kurang memiliki

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

kemampuan maka akan menghambat penyelenggaraan pembangunan daerah karena pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah sendiri. Oleh karena itu, dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah, sangat penting untuk memperluas perspektif tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada integrasi kebijakan yang mendukung daya tahan ekonomi daerah terhadap risiko jangka panjang (Duli, 2025).

Sehinggan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menganalisis tingkat desentralisasi keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Lembata dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Permatasari et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Konsep ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah secara merata (Trisakti & Djajasinga, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah harus ditopang oleh sistem yang kuat, seperti penyerahan kewenangan secara menyeluruh kecuali bidang strategis nasional, dan penguatan lembaga-lembaga politik lokal (Tang, 2021). Otonomi daerah juga membutuhkan kemandirian fiskal yang kuat agar daerah tidak selalu bergantung pada pusat. Tanpa kemampuan keuangan yang memadai, pelaksanaan otonomi hanya akan menjadi beban tambahan tanpa hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat (Yulianadewi et al., 2022).

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah (Sipayung & Cristian, 2022). Menurut UU Nomor 12 Tahun 2019 menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik (Fisher, 2022).

Selain itu, keuangan daerah juga menjadi alat kebijakan untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah (Hasan et al., 2020). Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting sebagai sumber pembiayaan yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah (Haptari et al., 2022). Dengan kata lain, kualitas pengelolaan keuangan akan sangat menentukan apakah suatu daerah mampu menjalankan otonomi secara efektif atau justru menjadi beban pusat karena tingginya ketergantungan dana transfer (Siahay, 2021).

C. Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian integral dalam pelaksanaan otonomi daerah (Jenerio et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang sistem keuangan pusat dan daerah yang mencakup perimbangan keuangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana insentif daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan fiskal dan efisiensi alokasi sumber daya keuangan Negara (Fisher, 2022).

Dalam konteks ini, prinsip *money follows function* diterapkan agar setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah disertai dengan sumber pendanaannya (Jenerio et al., 2024). Hal ini penting agar desentralisasi tidak hanya simbolik, melainkan benar-benar memberi ruang bagi daerah untuk berkembang. Keberhasilan hubungan keuangan ini bergantung pada sistem distribusi yang adil, partisipatif, dan mempertimbangkan kebutuhan serta kapasitas masing-masing daerah.

D. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola sumber daya keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan (Yulianadewi et al., 2022). Sehingga, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin tinggi pula kemandirian suatu daerah. Dalam praktiknya, kemampuan keuangan daerah diukur melalui berbagai rasio seperti kemandirian, ketergantungan, efektivitas, efisiensi, dan desentralisasi fiskal.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

1. Rasio kemandirian menunjukkan perbandingan PAD terhadap dana perimbangan (Susanto, 2019).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 1.
Pengukuran Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase PAD terhdap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan daerah
0,00-10.00	Sangat Baik
10,01-20,00	Baik
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Kurang
>50,00	Sangat Kurang

2. Rasio ketergantungan menunjukkan ketergantungan daerah pada dana pusat (Oki et al., 2020).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10.00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

3. Rasio desentralisasi fiskal mengukur proporsi PAD dalam total pendapatan daerah (Oki et al., 2020).

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan daerah (TPD)}}$$

Tabel 3.
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhdap TPD	**Tingkat Desentralisasi Fiskal**
0,00-10.00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

4. Rasio efektivitas menggambarkan pencapaian target pendapatan (Susanto, 2019).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \text{x} 100\%$$

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Tabel 4.
Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

5. Rasio efisiensi untuk menilai optimalisasi penggunaan belanja terhadap pendapatan (Susanto, 2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \text{x}100\%$$

Tabel 5.
Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian empiris dengan datanya bersifat angka/statistic (Muhammad Taufiq Azhari, Al Fajri Bahri, Asrul, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Kabupaten Lembata dari tahun 2017-2021.
Teknik Analisis data Rasio Keuangan yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian:
   Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan jumlah Penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman Daerah (Susanto, 2019).
b. Rasio Ketergantungan:
   Untuk menghitung Rasio Ketergantunga keuangan daerah diukur dengan membandingkan total Pendapatan Transfer dibagi dengan total penerimaan (Oki et al., 2020).
c. Rasio Desentralisasi Fiskal:
   Untuk menghitung Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah diukur dengan membandingkan PAD dibagi dengan total penerimaan daerah (Oki et al., 2020)
d. Rasio Efektifitas:
   Untuk menghitung Rasio Efektivitas keuangan daerah diukur dengan membandingkan Rasio Realisasi Penerimaan dibagi dengan Target Penerimaan. (Susanto, 2019).
e. Rasio Efisiensi:
   Untuk menghitung Rasio Efisiensi keuangan daerah diukur dengan membandingkan Rasio Pengeluaran Belanja dibagi dengan Pendapatan (Susanto, 2019).

JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 1-11

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Temuan

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kemandirian Rasio	Kriteria
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4=2/3x100%]*	*[5]*
2017	37.992.916.558,69	689.313.530.673,93	5,51%	Rendah Sekali
2018	42.882.808.397,73	736.854.230.625,00	5,82%	Rendah Sekali
2019	51.718.451.391,20	841.582.081.615,00	6,15%	Rendah Sekali
2020	44.244.016.164,15	762.825.458.318,81	5,80%	Rendah Sekali
2021	38.137.978.070,68	731.703.335.938,00	5,21%	Rendah Sekali
Rata-rata	42.995.234.116,49	752.455.727.434,15	5,70%	Rendah Sekali

Sumber : Kantor Litbangda Kabupaten Lembata 2023 diolah

B. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.
Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	Klasifikasi Rasio Ketergantungan	Kriteria
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4=2/3x100%]*	*[5]*
2017	689.313.530.673,93	778.930.973.748,86	88,49%	Sangat Tinggi
2018	736.854.230.625,00	793.953.759.022,73	92,81%	Sangat Tinggi
2019	841.582.081.615,00	912.327.928.832,20	92,25%	Sangat Tinggi
2020	762.825.458.318,81	841.195.830.477,96	90,68%	Sangat Tinggi
2021	731.703.335.938,00	786.645.925.608,68	93,02%	Sangat Tinggi
Rerata	752.455.727.434,15	822.610.883.538,09	91,45%	Sangat Tinggi

Sumber : Kantor Litbangda Kabupaten Lembata 2023 diolah

C. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Klasifikasi Rasio Desentralisasi	Kriteria
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4=2/3x100%]*	*[5]*
2017	37.992.916.558,69	731.606.447.232,62	5,19%	Sangat Kurang
2018	42.882.808.397,73	793.953.759.022,73	5,40%	Sangat Kurang
2019	51.718.451.391,20	912.327.928.832,20	5,67%	Sangat Kurang
2020	44.244.016.164,15	841.195.830.477,96	5,26%	Sangat Kurang
2021	38.137.978.070,68	786.645.925.608,68	4,85%	Sangat Kurang
Rata-rata	42.995.234.116,49	813.145.978.234,84	5,27%	Sangat Kurang

Sumber : Kantor Litbangda Kabupaten Lembata 2023 diolah

D. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JISHARA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 1-11

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Tabel 9.
Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Klasifikasi Rasio Efektifitas	Kriteria
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4=2/3x100%]*	*[5]*
2017	37.992.916.558,69	36.827.621.685,00	103,16%	Sangat Efektif
2018	42.882.808.397,73	48.341.360.073,00	88,71%	Cukup Efektif
2019	51.718.451.391,20	76.851.137.418,00	67,30%	Kurang Efektif
2020	44.244.016.164,15	68.930.578.565,00	64,19%	Kurang Efektif
2021	38.137.978.070,68	62.604.926.943,00	60,92%	Kurang Efektif
Rata-rata	42.995.234.116,49	58.711.124.936,80	76,85%	Kurang Efektif

Sumber : Kantor Litbangda Kabupaten Lembata 2023 (diolah)

E. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10.
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Klasifikasi Rasio Efisien	Kriteria
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4=2/3x100%]*	*[5]*
2017	738.444.560.948,40	778.930.973.748,86	94,8%	Kurang Efisien
2018	795.151.389.483,67	793.953.759.022,73	100,2%	Tidak Efisian
2019	926.466.269.006,46	912.327.928.832,20	101,5%	Tidak Efisien
2020	843.824.447.890,22	841.195.830.477,96	100,3%	Tidak Efisien
2021	800.320.564.906,03	786.645.925.608,68	101,7%	Tidak Efisien
Rata-rata	820.841.446.446,96	822.610.883.538,09	99,7%	Kurang Efisian

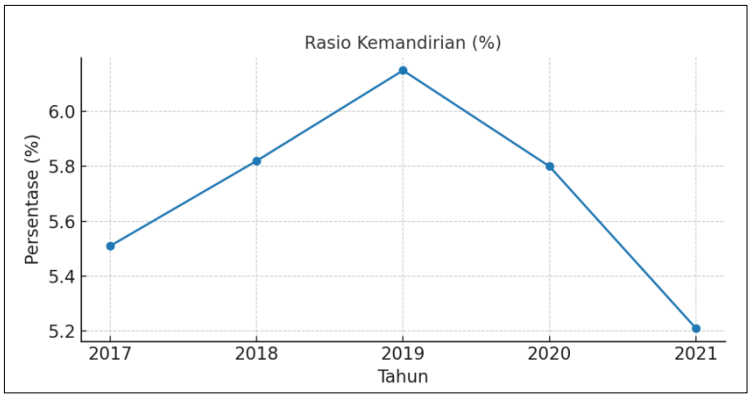
Sumber : Kantor Litbangda Kabupaten Lembata 2023 diolah

Diskusi

.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2017 rasio kemandirian yang dihasilkan yaitu sebesar 5,51%. Pada periode tahun 2018 rasio kemandirian mengalami peningkatan sebesar 5,81%. Pada periode tahun 2019 rasio kemandirian terus mengalami peningkatan sebesar 6,14%. Pada periode tahun 2020 rasio kemandirian turun menjadi 5,80% kemudian di periode tahun 2021 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 5,21%. Berdasarkan rata-rata data lima tahun terakhir (2017 – 2021) di atas sebesar 5.70%, kondisi ini menggambarkan bahwa Rasio Kemandirian Keaungan Daerah Kabupaten Lembata yang dihasilkan masih sangat kurang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah. Kriteria rasio kemandirian keuangan daerah melebihi 50% artinya kemandirian keuangan yang di hasilkan masih sangat kurang (Susanto, 2019). Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

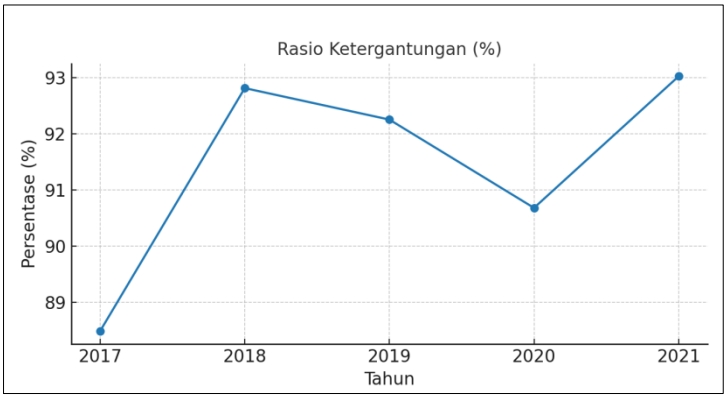
Kurva rasio kemandirian menunjukkan pola fluktuatif yang cenderung datar di kisaran 5–6%. Tidak

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

adanya lonjakan tajam menandakan belum ada upaya signifikan dalam penguatan basis PAD. Hal ini bisa jadi akibat keterbatasan kapasitas fiskal, lemahnya basis perpajakan lokal, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan yang mandiri. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, perlu adanya penguatan sektor unggulan daerah dan perbaikan tata kelola penerimaan daerah.

B. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan dapat dilihat pada tabel 3. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2017 berada di angka 88,49%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 92,81%, pada tahun 2019 rasio ketergantungan sebesar 92,25%. Pada tahun 2020 cenderung menurun menjadi 90,68% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar seperti tahun sebelumnya sebesar 93,02%. Rata-rata rasio ketergantungan sebesar 91,45%. Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dengan rata-rata sebesar 91,45%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah kabupaten lembata adalah sangat tinggi. Semakin tinggi rasio presentasi keuangan daerah maka semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat (Oki et al., 2020). Keadaan ini dapat di lihat pada **Gambar 3** di bawah ini



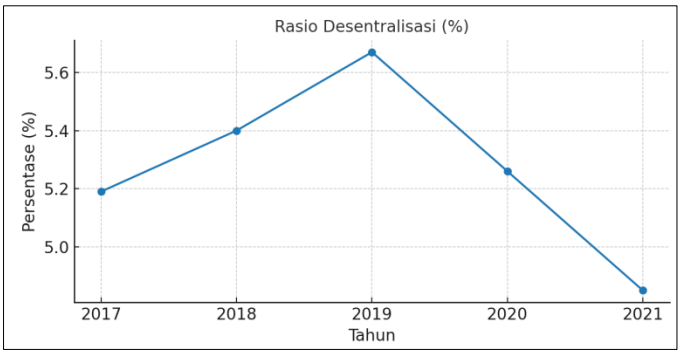
Gambar 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kurva rasio ketergantungan menggambarkan garis tren yang tetap tinggi dengan sedikit variasi antar tahun. Kurva ini memperlihatkan tidak adanya keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan keuangan, yang mencerminkan kegagalan dalam memperkuat basis ekonomi lokal atau mengoptimalkan PAD. Dibutuhkan strategi diversifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah agar dapat menekan dominasi ketergantungan dari transfer pusat.

C. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 4. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pada tahun 2017 berada di angka 4,87%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,40%. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 5,67%. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 5,25% dan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 4,84%. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,27% dari total pendapatan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Kondisi tersebut terjadi karena upaya pemerintah dalam menggali penerimaan dari sektor pajak belum optimal (Martaliah et al., 2020). Kondisi ini dapat di lihat pada Gambar 4 di bawah ini.

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

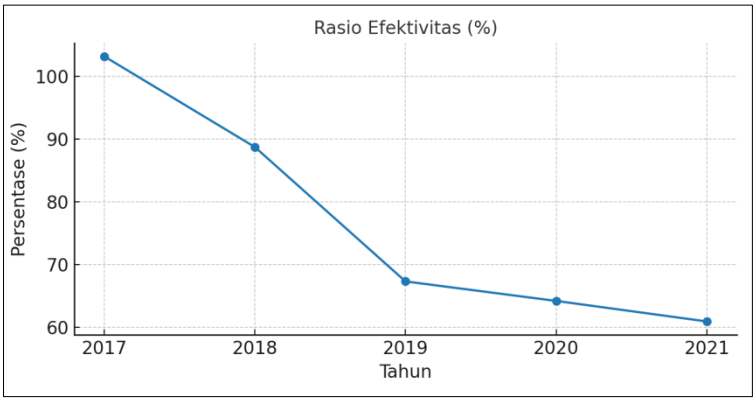


Gambar 4. Rasio Desentralisasi Fiskal

Kurva desentralisasi fiskal menunjukkan garis datar dengan sedikit peningkatan pada tahun 2018–2019, namun kembali menurun setelahnya. Hal ini menunjukkan stagnasi dalam kapasitas daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi pemungutan PAD serta mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal.

D. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas dapat dilihat pada tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2017 rasio efektifitas yang dihasilkan yaitu sebesar 103,16%. Pada periode tahun 2018 rasio efektifitas mengalami penurunan sebesar 88,71%. Pada periode tahun 2019 rasio efektifitas mengalami penurunan sebesar 67,30%. Pada periode tahun 2020 rasio efektifitas mengalami penurunan menjadi 64,19%, kemudian di periode tahun 2021 rasio efektifitas kembali mengalami penurunan seperti tahun sebelunya sebesar 60,92%. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir (2017-2021) tergolong dalam katagori kurang efektif dengan rata-rata sebesar 76,85%. Presntasi rasio efektifitas 60-80% di kategorikan kurang efektif (Susanto, 2019). Kondisi ini dapat di lihat pada **Gambar 5** di bawah ini



Gambar 5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

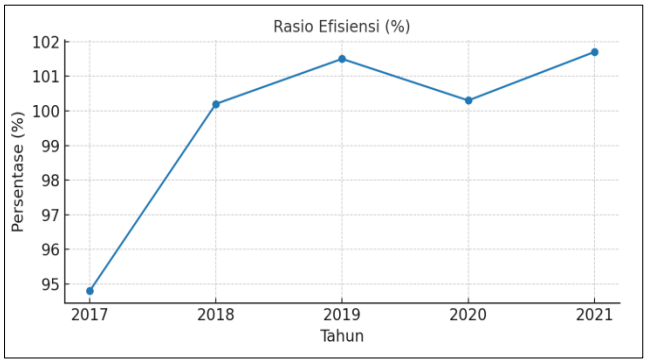
Kurva efektivitas memperlihatkan penurunan yang tajam setelah tahun 2017. Grafik ini menggambarkan penurunan kinerja fiskal yang konsisten, dan menjadi peringatan bahwa diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah memperbaiki sistem prediksi penerimaan serta memperkuat manajemen PAD secara digital.

E. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel 6**.** Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Periode 2017-2021, pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 berada di angka 94,8%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 100,2%. Pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan menjadi 101,5%. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 100,3% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 101,7%. Perhitungan rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir (2017-2021) kurang efisien, hal ini dikarenakan rata-rata rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir adalah sebesar 99,7%, dengan kriteria kurang efisien. Presentasi kinerja keuangan terhadap efisiensi dengan kriteria 80-100%

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

adalah kurang efisien (Susanto, 2019). Keadaan ini dapat di lihat pada Gambar 6 di bawah ini



Gambar 6. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kurva efisiensi menunjukkan garis tren yang konsisten tinggi, bahkan melewati ambang 100% pada beberapa tahun. Kondisi ini menandakan adanya mismatch antara pendapatan dan belanja. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan pengendalian belanja yang lebih ketat dan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja. Evaluasi belanja publik perlu difokuskan pada outcome, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Kesimpulan

A. Kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian berada dalam kriteria sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Lembata terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat besar.
B. Kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Ketergantunga berada dalam kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lembata terhadap pusat sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lembata masih sangat bergantung dengan bantuan dari dana perimbangan atau bantuan dari pemerintah pusat.
C. Kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kriteria sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil.
D. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dari tahum 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas berada dalam kriteria kurang efektif. Hal ini berarti pemerintah Daerah kabupaten Lembata masih lemah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan.
E. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata darii tahum 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efisiensi berada dalam kriteria tidak efisien. Hal ini berarti Pemerintah Daerah kabupaten Lembata dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, belanja daerah cenderung lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah

Daftar Pustaka

Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, *4*(1), 33–41. https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909

Alting, U., Pontoh, W., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(04), 89–97. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20018.2018

Bosso, E., Diana, F., & Asirah, A. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara. *Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting*, *5*(1), 34–49. https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.423

Duli, D. (2025). Analisis Resiliensi Ekonomi Lokal dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *20*(1), 1–14. https://doi.org/10.47441/jkp.v20i1.404

Fisher, R. C. (2022). *State and Local Public Finance* (5th ed.). Routledge.

Gunawan, F. Y. (2022). Analisis Perkembangan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi

E-ISSN : XXXX-XXXX
P-ISSN : XXXX-XXXX

Daerah Provinsi Sumatra Utara (Studi Khasus Kota Medan). In *Institusional Repository Universitas Islam Sumatra Utara*. Universitas Islam Sumatra Utara.

Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Strategy for Increasing Regional Original Income Through Strengthening Some Factors in Regional Financial Indepedence. *Jurnal Ekonomi*, *11*(3), 926–934. http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi

Hasan, M. M., Yajuan, L., & Mahmud, A. (2020). Regional Development of China's Inclusive Finance Through Financial Technology. *SAGE Open*, *10*(1). https://doi.org/10.1177/2158244019901252

Jenerio, R., Wati, W., Jamilah, F. L., Tuahnu, B., & Kristhy, M. E. (2024). Financial Relations Between Central Government and Regional Government in Regional Autonomy. *Journal of Political And Legal Sovereignty*, *1*(4), 135–141. https://doi.org/10.38142/jpls.v1i4.141

Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa*, *14*(1), 123–138. https://doi.org/https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316

Martaliah, N., Wahyuli, P., & Keuangan, K. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Periode Tahun 2013-2018. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *4*(3). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1227

Martira, A., & Nursadi, H. (2020). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1), 177–199. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490

Muhammad Taufiq Azhari, Al Fajri Bahri, Asrul, T. R. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Efitra (ed.); Cetakan Pe). PT. Sonbai Publishing Indonesia.

Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Juni*, *5*(2), 1–6.

Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P. A., & Syahrin Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, *1*(09), 431–439. https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37

Pratiwi Subianto, & Irawan, I. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya. *Edunomics Journal*, *3*(1), 31–43. https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.4005

Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455

Siahay, A. Z. D. (2021). Financial Mamagement Policy of Transfer to Regional and Village Funds, Regional Budget, and Special Autonomy. *Indonesian Interdiciplinary Journal of Sharia Economics*, *8*(2), 6973–6991. https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal

Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). the Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *2*(3), 356–368. https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.92

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, *7*(1), 81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67

Tang, S. Y. (2021). Rethinking Local and Regional Governance in China: An Institutional Design and Development Perspective. *Urban Governance*, *1*(1), 51–58. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.11.002

Trisakti, F., & Djajasinga, N. (2021). Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Blended Learning, Educational Technology and Innovation (ACBLETI 2020)*, *560*(Acbleti 2020), 49–53. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.010

Vukovic, D. B., Radulovic, D., Markovic, M., Kochetkov, D. M., & Vlasova, N. Y. (2017). Development of a Financial Framework for the National Plan for Regional Development: The Evidence from Serbia. *Economy of Regions*, *13*(4), 1314–1328. https://doi.org/10.17059/2017-4-27

Wawo, R. (2020). *Realisasi PAD Kabupaten Lembata Tahun 2020 baru Capai 4,5 Persen*. Pos-Kupang.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *3*(2), 465–472. https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161

Yulianadewi, I., Johanis, A. R., & Nurdiana. (2022). Analysis of Regional Financial Capability in the Context of Regional Autonomy in Makassar City. *Jurnal Economic Resource*, *5*(1), 143–156. https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.281